



DJKN

LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH

2024

KANTOR WILAYAH DJKN ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selaras dengan semangat yang diusung pada tahun 2024 untuk memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan dari pengguna layanan, kami menyusun laporan kinerja ini sebagai refleksi dari komitmen kami untuk terus melayani lebih baik. Melalui inovasi, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan, kami berupaya meningkatkan setiap aspek pelayanan yang diberikan sehingga berdampak positif bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.

Sejalan dengan membangun fondasi yang kokoh untuk melayani lebih baik, KPKNL Banda Aceh kembali mencatat dan menyelesaikan seluruh capaian dengan baik. Tentunya, semua ini tidak terlepas dari kolaborasi seluruh insan KPKNL Banda Aceh dari Kepala Kantor sampai pelaksana dengan semangat dan dedikasi yang lebih membara dari tahun sebelumnya untuk bekerja keras menyelesaikan Kontrak Kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024. Adapun hasil dari komitmen kami disusun dan dilaporkan melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Banda Aceh Tahun 2024. Laporan ini bukan hanya sekedar rangkaian angka dan statistik, namun merupakan cerminan dari upaya kolektif untuk menciptakan pelayanan terbaik.

Terucap puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024, sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja KPKNL Banda Aceh atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan kepada KPKNL Banda Aceh selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka sebagai instansi pemerintah, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dilakukan berdasarkan realisasi IKU Kemenkeu-Wide Tahun 2024 yang di-*cascade* secara langsung maupun tidak langsung, dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Banda Aceh. Rata-rata capaian IKU KPKNL Banda Aceh Tahun 2024 untuk Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 110,69% dari 11 Sasaran Strategis (SS) dengan total 19 IKU. Secara keseluruhan IKU yang dicapai pada tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan.

Harapannya, LAKIN KPKNL Banda Aceh Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban KPKNL Banda Aceh serta upaya meningkatkan kualitas layanan Pengelolaan Kekayaan Negara,

Piutang Negara, dan Lelang untuk menjawab semakin tingginya harapan masyarakat atas kinerja dan pelayanan birokrasi.

Akhir kata, kepada seluruh pegawai KPKNL Banda Aceh, diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas integritas, pelayanan, profesionalisme, sinergi, dan semua upaya agar mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan tugas. Tak lupa pula kami membuka diri atas segala saran dan kritik dari seluruh stakeholder sebagai salah satu upaya kami untuk memperbaiki layanan dan akuntabilitas kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 31 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Istina Setya Lestari

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). KPKNL Banda Aceh sebagai ujung tombak pelayanan di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menjadikan laporan kinerja sebagai alat kontrol, alat pengukuran kinerja sesuai dengan tujuan organisasi, dan alat pemacu dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance* untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Laporan Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2024 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, transparan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPKNL Banda Aceh dalam meningkatkan kinerja. Laporan Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2024 juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis DJKN 2020-2024, di mana terdapat 4 (empat) tujuan pokok dalam kerangka pembangunan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 yakni Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel, optimal, dan produktif; Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; serta Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Berdasarkan strategi-strategi yang termaktub dalam Rencana Strategis, KPKNL Banda Aceh menyusun Kontrak Kinerja yang di dalamnya memuat Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut menjadi alat kontrol kuantitatif dalam pengukuran berhasil atau tidaknya KPKNL Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan.

Sepanjang tahun 2024, KPKNL Banda Aceh telah menorehkan pencapaian yang dapat diukur secara kuantitatif melalui penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dihasilkan berdasarkan capaian IKU, yaitu sebagai berikut:

- a) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dengan realisasi 113% dari target 100%;
- b) Indeks Integritas sebesar 103,67% atau pencapaian 92,44 dari target 89,17;
- c) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 101,38% dengan realisasi 72,49% dari target 71,5%;
- d) Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN sebesar 106,58% dengan realisasi 92,19% dari target 86,5%;

- e) Persentase Realisasi Pokok Lelang mencapai 60,23% dengan pencapaian nilai 60,23% dari target 100%;
- f) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara sebesar 123,48% atau pencapaian 123,48% dari target 100%;
- g) Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian sebesar 120% atau pencapaian 90 dari target 75;
- h) Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan sebesar 102,48% dari target 100%;
- i) Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) sebesar 196% dari target 100%;
- j) Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) sebesar 65% dari target 65%;
- k) Persentase Produktivitas Lelang sebesar 108,73% dari target 89%;
- l) Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian sebesar 199,25% dari target 16% tercapai 0,12%;
- m) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko dengan pencapaian 98,48 dari target 85;
- n) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan realisasi 120% atau pencapaian nilai 113,50% dari target 90%;
- o) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dari target 100% terealisasi 120%;
- p) Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN dengan realisasi 0,00% dari target 10%;
- q) Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) dengan pencapaian 100 dari target 80;
- r) Indeks Efektivitas UKI dari target 82 tercapai 98,79 sehingga mendapat nilai 120%;
- s) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti sebesar 100% dari target 98%.

Secara umum, seluruh pencapaian IKU pada tahun 2024 memenuhi target bahkan pada beberapa IKU melebihi target, kecuali pada IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang yang mencapai nilai 60,23% dari target maksimal 100%.

KPKNL Banda Aceh sebagai kantor yang terus bergerak maju tentunya tidak terlena dengan hasil pencapaian yang telah diraih, namun terus mendorong seluruh pegawai semakin antusias dan bersemangat untuk memberikan kontribusi nyata yang optimal, inovasi yang aplikatif, dan ide-ide terbaik di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I.....	8
PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi	8
C. Wilayah Kerja KPKNL Banda Aceh.....	15
D. Mandat Yang Diberikan kepada KPKNL Banda Aceh	15
E. Isu-Isu Strategis (Keunggulan, Tantangan, dan Permasalahan)	16
F. Sistematika Laporan	18
BAB II.....	19
PERENCANAAN KINERJA	19
BAB III.....	22
AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
1. Target dan Realisasi Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2023 dan Perbandingannya	22
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja	32
3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Target	40
4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
5. Analisis atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan	41
6. Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi.....	42
7. Rencana Aksi	43
B. Kinerja Lainnya	43
C. Realisasi Anggaran.....	44
BAB IV.....	48
PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	13
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan	13
Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Golongan	14
Tabel 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jenis Kelamin dan Golongan.....	14
Tabel 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Fungsional.....	14
Tabel 2. 1 Kontrak Kinerja Nomor PK-1/WKN.01/2024.....	20
Tabel 3. 1 Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2024.....	26
Tabel 3. 2 Target dan Capaian Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2023.....	29
Tabel 3. 3 Capaian KPKNL Banda Aceh dalam Renstra Kanwil DJKN Aceh 2020-2024	31
Tabel 3. 4 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan I Tahun Anggaran 2024.....	45
Tabel 3. 5 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan II Tahun Anggaran 2024.....	45
Tabel 3. 6 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan III Tahun Anggaran 2024.....	45
Tabel 3. 7 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	46
Tabel 3. 8 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2024.....	46
Tabel 3. 9 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Kegiatan KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2024....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Strategi KPKNL Banda Aceh	19
Gambar 3. 1 Piagam Penghargaan IKPA Triwulan III 2024.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah diubah menjadi Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan salah satu rangkaian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilakukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 yang berisi rincian target dan kegiatan serta realisasi yang telah dicapai KPKNL Banda Aceh dari bulan Januari hingga Desember tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh, memiliki kewenangan melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang di wilayah kerja KPKNL Banda Aceh.

Struktur organisasi KPKNL Banda Aceh terdiri dari 1 (satu) jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor), dan 5 (lima) eselon IV.a (Kepala Seksi/Kasubbag Umum), serta kelompok jabatan fungsional. Ketentuan tersebut merupakan hal yang baru dikarenakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57/2020 tentang Kementerian Keuangan terdapat perubahan atas 6 (enam) fungsi utama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yaitu “Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Dipisahkan, Kekayaan Negara Lain-lain, Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang”, menjadi 3 (tiga) fungsi utama yaitu “Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang”. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN juga bertekad untuk mentransformasi diri guna mengantisipasi arah strategis Kementerian Keuangan maupun arah strategis pemerintah Indonesia secara global.

Visi

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada KPKNL Banda Aceh, seluruh pegawai KPKNL Banda Aceh telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta *Roadmap DJKN towards a Distinguished Asset Manager* yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019, maka visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Adapun Pengelola Kekayaan Negara diharapkan memiliki karakter kontributif, instrumental,

otoritatif, berkelanjutan dan adaptif, dengan penjabaran lebih lanjut atas karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kontributif berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional.
- b. Instrumental berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara yang berperan penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi”.
- c. Otoritatif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional.
- d. Berkelanjutan diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum.
- e. Adaptif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya.

Misi

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung pencapaian Misi Kementerian Keuangan Nomor 4 yaitu “mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan resiko minimal” dan Nomor 2 yaitu “mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif” melalui Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan Kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Tujuan

Guna menjabarkan strategi organisasi atau mengimplementasikan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun ke depan, maka dipandang perlu untuk menetapkan tujuan

organisasi. Dalam kaitan ini, KPKNL yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang juga memiliki tujuan yang berkorelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Adapun tujuan KPKNL Banda Aceh sesuai dengan tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Sasaran

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Sasaran Strategis untuk mendukung pencapaian tujuan DJKN yaitu :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberikan manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah :
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif

Beranjak dari sasaran sebagaimana tersebut di atas, sasaran yang ingin dicapai oleh KPKNL Banda Aceh dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- A. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
 - a. Terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara;

- b. Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat nilai, tepat guna dan tepat sasaran;
 - c. Terwujudnya informasi nilai terkini dan nilai potensial kekayaan negara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- B. Seksi Piutang Negara
- a. Terwujudnya pengurusan piutang negara secara sehat dan bersih;
 - b. Tercapainya target piutang negara yang dapat diselesaikan;
 - c. Terwujudnya pengelolaan dokumen asli barang jaminan.
- C. Seksi Hukum dan Informasi
- a. Tercapainya peningkatan penatausahaan BKPN dan penyajian informasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang dan lelang;
 - b. Tercapainya optimalisasi penanganan perkara.
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif.
- D. Seksi Kepatuhan Internal
- a. Pelaksanaan SOP Unggulan tepat waktu;
 - b. Penyusunan kontrak kinerja yang tepat waktu dan mencerminkan capaian kinerja masing-masing pegawai dan organisasi;
 - c. Mendefinisikan risiko yang mungkin terjadi beserta langkah-langkah pencegahan dan penanganan masalah;
 - d. Memastikan kode etik dan peraturan disiplin pegawai yang berlaku dijalankan oleh seluruh pegawai;
 - e. Memastikan hasil pemeriksaan aparat fungsional ditindaklanjuti;
 - f. Laporan hasil pelaksanaan SOP Layanan Unggulan yang andal dan akurat.
- E. Subbagian Umum
- a. Terlaksananya pemberian dukungan teknis dan administrasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
 - b. Pelaksanaan DIPA yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
 - c. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional kantor.
- F. Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang
- a. Terselenggaranya pelayanan lelang yang modern, bersih, transparan dan akuntabel;
 - b. Tercapainya target hasil lelang baik dari pokok lelang maupun bea lelang;
 - c. Tercapainya lelang yang produktif.
- G. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai
- a. Administrasi Seksi Pelayanan Penilaian yang tertib dan berkualitas;

- b. SDM Penilai yang handal;
- c. Pelayanan penilaian dalam rangka utilisasi BMN yang optimal;
- d. Pelayanan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara yang optimal;
- e. Tersedianya harga pasar yang wajar dalam rangka penyusunan DKPB.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Banda Aceh menyelenggarakan fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Komposisi Pegawai

Dalam menjalankan tugasnya pada Tahun 2024, KPKNL Banda Aceh didukung oleh 29 Pegawai PNS serta didukung oleh 10 Pegawai Non PNS (honorar). Adapun komposisi pegawai PNS pada KPKNL Banda Aceh dapat dipetakan berdasarkan golongan, pendidikan, usia, dan kelompok fungsional.

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
	A	B	C	D	
II	1	0	5	6	12
III	6	3	2	3	14
IV	2	1	0	0	3
JUMLAH	9	4	7	9	29

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SLTA / D1	0	1	1	0	2
D3	0	11	1	0	12
D4/S1	0	0	11	0	11
S2	0	0	1	3	4
JUMLAH	0	12	14	3	29

Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Golongan

USIA	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	0	12	2	0	14
31-40	0	0	7	0	7
41-50	0	0	3	3	6
Di atas 50	0	0	2	0	2
JUMLAH	0	12	14	3	29

Tabel 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jenis Kelamin dan Golongan

JENIS KELAMIN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Laki-laki	0	5	10	2	17
Perempuan	0	7	4	1	12
JUMLAH	0	12	14	3	29

Tabel 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Fungsional

UNIT KERJA	Juru Sita	Pejabat Lelang	Pemeriksa	Penilai	Pranata Keuangan	Jumlah
Seksi Hukum dan Informasi	0	0	0	0	0	0
Seksi Kepatuhan Internal	0	0	0	0	0	0
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	0	0	0	0	0	0
Seksi Piutang Negara	1	0	1	0	0	2
Subbagian Umum	0	0	0	0	1	1
Kelompok Jabatan Fungsional	0	3	0	3	0	6
JUMLAH	1	3	1	3	1	9

C. Wilayah Kerja KPKNL Banda Aceh

KPKNL Banda Aceh memiliki wilayah kerja yang luas meliputi 13 kota dan/atau kabupaten, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Adapun kota dan kabupaten yang termasuk wilayah kerja KPKNL Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kota Banda Aceh;
- b. Kota Sabang;
- c. Kab. Aceh Besar;
- d. Kab. Aceh Jaya;
- e. Kab. Pidie;
- f. Kab. Pidie Jaya;
- g. Kab. Aceh Barat;
- h. Kab. Nagan Raya;
- i. Kab. Aceh Barat Daya;
- j. Kab. Aceh Selatan;
- k. Kota Subulussalam;
- l. Kab. Aceh Singkil;
- m. Kab. Simeulue.

D. Mandat Yang Diberikan kepada KPKNL Banda Aceh

KPKNL Banda Aceh sebagai instansi vertikal DJKN yang diberi mandat untuk mengelola barang telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk merapikan manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara serta utilisasi aset negara yang optimal. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL Banda Aceh dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu:

- a. Tema Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan;
- b. Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan ekonomi dan keadilan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tersebut di atas, terdapat strategi-strategi yang harus ditempuh, yaitu:

- a. Membuat usulan atas peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- b. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, lelang dengan akurat dan akuntabel;
- c. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;

- e. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset *idle* dan pengurusan piutang negara;
- f. Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- g. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- h. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- i. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

E. Isu-Isu Strategis (Keunggulan, Tantangan, dan Permasalahan)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir DJKN sebagai manajer aset mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa pengembangan organisasi modern pengelola kekayaan negara yang semakin berorientasi pada pelanggan dengan percepatan pelayanan melalui dukungan teknologi informasi yang terus disempurnakan. Sejalan dengan “Cetak Biro Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025”, hal ini menandai komitmen DJKN dalam meningkatkan pengelolaan yang lebih baik seiring tuntutan kekinian dalam era transformasi digital (digitalisasi). Digitalisasi merupakan upaya meningkatkan kualitas proses bisnis dalam setiap tahapan manajemen aset dan investasi melalui pembangunan sistem yang andal dan terintegrasi. Pelanggan akan lebih mudah mengajukan permohonan pengelolaan aset dan investasi kepada DJKN sehingga pelayanan dapat dengan cepat ditindaklanjuti.

- a. Sebagai organisasi pembelajar, DJKN terus berupaya mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah dilalui sehingga meningkat ke tahapan tingkat lanjut dari manajemen aset (*asset management maturity*). Untuk mewujudkan hal ini secara lebih sistematis dan terukur, mendesain *roadmap* menjadi suatu konsekuensi logis sebagai arahan mencapai cita-cita kondisi paripurna yang diharapkan (*end state*). Berangkat dari penelitian dan pemikiran atas seluruh keunggulan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi saat ini, DJKN mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara tugas dan fungsi ideal dan implementasi riil yang saat ini dilakukan (*current state*). Kondisi paripurna manajer aset yang ingin dicapai terbagi kedalam 3 (tiga) hal yaitu: Kekayaan negara dikelola optimal dan berkelanjutan. Instrumental dalam Keuangan Negara. dan Kontributif dalam perekonomian nasional.
- b. Pada Tahun 2024 terdapat prestasi hebat yang diukir oleh KPKNL Banda Aceh, diantaranya mendapatkan Nilai IKPA Sempurna (Nilai 100) pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024.
- c. Sumber daya manusia yang unggul dan aktif sehingga terdapat 2 (dua) orang pegawai KPKNL Banda Aceh yang sedang menempuh pendidikan yaitu dalam program Master pada Lee Kuan Yew

School of Public Policy, National University of Singapore, dan program DIV Manajemen Aset Publik pada PKN STAN.

- d. KPKNL Banda Aceh juga masih turut serta menjadi salah satu peserta Kantor Pelayanan Terbaik di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- e. Pencapaian yang luar biasa dari KPKNL Banda Aceh adalah capaian penerimaan dari PNBPN Piutang Negara yang mencapai 239,04% yakni dari target Rp13.600.000,00 tercapai sebesar Rp32.509.030,59. Capaian tahun ini juga digenapkan dengan berhasilnya capaian Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) yang memiliki total realisasi sebanyak 102 NUP Evaluasi dan Tindak lanjut atau sebesar 196,16% dari target 51 NUP Evaluasi dan Tindak lanjut.
- f. Meningkatnya frekuensi lelang berdampak positif dengan peningkatan PNBPN akan tetapi berbanding lurus juga dengan peningkatan perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang baik yang non TGR ataupun TGR. Dalam kaitan ini, perlu adanya regulasi yang lebih tinggi selain PMK atas aturan Lelang.
- g. Tantangan dalam pengurusan piutang negara meliputi seringnya Debitor tidak mengakui utang, sulitnya penagihan dengan alasan keberadaan Debitor tidak dapat diketahui, dan barang jaminan yang tidak dikuasai oleh pengelola piutang (PUPN).
- h. Dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) serta pelaksanaan penilaian juga memiliki beberapa tantangan dan permasalahan seperti wilayah kerja KPKNL Banda Aceh yang sangat luas dan sulit untuk ditempuh dengan perjalanan darat, beberapa aplikasi masih kurang mendukung percepatan proses pengelolaan, dan lambatnya proses pengelolaan diakibatkan oleh kompetensi *user* pengguna yang lemah.
- i. Selanjutnya, terdapat IKU yang meskipun tercapai namun memiliki tantangan tersendiri untuk menggapai keberhasilan seperti IKU PNBPN atas pengelolaan kekayaan negara. Terdapat PNBPN khususnya dari satuan kerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee dan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri yaitu pada Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 425112 (Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya) yang sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian PNBPN, sehingga berpengaruh pada realisasi IKU dimaksud.
- j. Dalam hal mencapai capaian SBSK juga memiliki tantangan yang cukup berat, salah satunya karena kurangnya optimalisasi penggunaan aset pada satuan kerja yang menjadi target SBSK pada tahun 2024. Beberapa gambaran kondisi di lapangan antara lain, terdapat aset yang tidak dihuni, terdapat aset yang rusak berat namun tidak dihapuskan, aset idle namun tidak dimanfaatkan, dan lain lain. Di samping itu, ketidaktepatan satuan kerja dalam hal pengklasifikasian aset berdampak pada nilai optimalisasi yang rendah.

F. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2024 ini terdiri atas:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan kondisi KPKNL Banda Aceh secara umum, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi KPKNL Banda Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ikhtisar peta strategi serta perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
 - a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
 - b. target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - c. target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024
3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pencapaian kinerja;
8. Rencana Aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

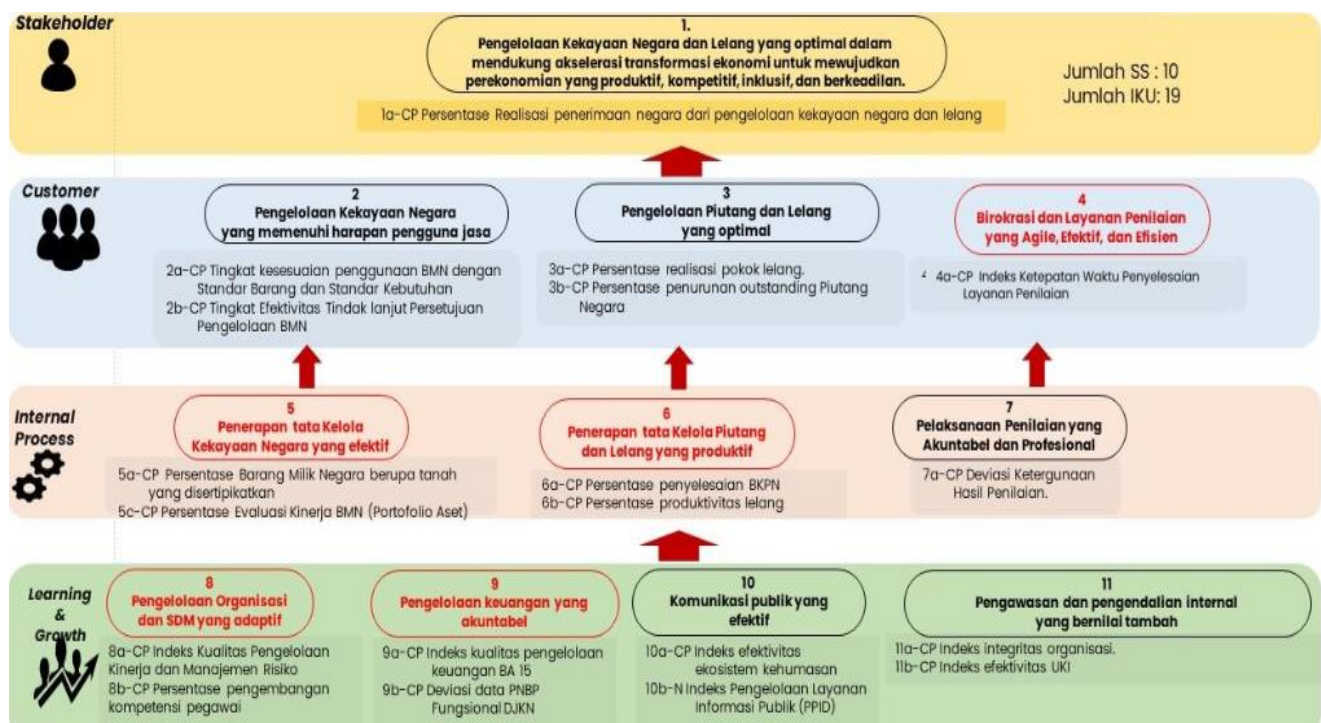
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis KPKNL Banda Aceh merupakan wujud amanat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 245/KN/2015 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 dan penjabaran dari Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 239/KN/2019 tentang Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2019-2028 (*Roadmap to A Distinguished Asset Manager*). Berdasarkan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 yang telah dirumuskan, untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Banda Aceh. Pada perjanjian kinerja tahun 2024, KPKNL Banda Aceh telah menetapkan peta strategi di tahun 2024 sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Peta Strategi KPKNL Banda Aceh



Perjanjian / kontrak kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Bersamaan dengan telah ditetapkannya Peta Strategi, KPKNL Banda Aceh memiliki perjanjian kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor PK-1/WKN.01/2024. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Nomor PK-1/WKN.01/2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	71,5%
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		5b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6.	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	65%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		6b-CP Persentase Produktivitas Lelang	89%
7.	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
		8b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		9b-N Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN (minimize)	10%
10.	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks Efektivitas UKI	82
		11b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	98%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai perbandingan antara target dan capaian kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2024 yang dilengkapi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2023, 2022, 2021, 2020, 2019, dan 2018), sebagai referensi capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Bab ini juga akan dijelaskan mengenai hambatan dan evaluasi secara menyeluruh agar dapat menjadi masukan pada tahun berikutnya. Kemudian turut diuraikan mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada Tahun 2024.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi diukur dengan membandingkan data antara target dan realisasi, yang disajikan dalam bentuk persentase. Capaian ini dapat menunjukkan seberapa jauh proses atau kemajuan yang telah didapat dalam periode waktu tertentu.

1. Target dan Realisasi Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2024 dan Perbandingannya

Secara ringkas target dan realisasi capaian keluaran (output) KPKNL Banda Aceh pada Tahun 2024 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan						
	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max /
Realisasi	167%	109%	109%	101%	113%	113%	TLK

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan						
	1b-CP Indeks Integritas						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	10	20	20	30	89,17	89,17	Max /
Realisasi	10	20	20	42	92,44	92,44	TLK

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	60%	71,5%	71,5%	Max /
Realisasi	63%	62,53%	62,53%	90,95%	72,49%	72,49%	TLK

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	10%	45%	45%	60%	86,5%	86,5%	Max /
Realisasi	54%	56%	56%	83,59%	92,19%	92,19%	TLK

K-Wide	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal						
	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max /
Realisasi	129%	118,68%	118,68%	80,58%	60,23%	60,23%	TLK

K-Wide	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal						
	3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max /
Realisasi	681%	416%	416%	144%	123,48%	123,48%	TLK

K-Wide	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien						
	4a-N Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	Max /
Realisasi	93,6	95,71	95,71	90,26	90	90	TLK

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif						
	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	100%	100%	Max /
Realisasi	20%	20,80%	20,80%	70,69%	102,48%	102,48%	TLK

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif						
	5b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	100%	32%	32%	80%	100%	100%	Max /
Realisasi	180%	48%	48%	92%	196%	196%	TLK

K-Wide	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif						
	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	96%	90%	90%	81%	65%	65%	Min /
Realisasi	95%	88,66%	88,66%	80,40%	65%	65%	TLK

K-Wide	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif						
	6b-CP Persentase Produktivitas Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	60%	89%	89%	Max /
Realisasi	49,73%	75,58%	75,58%	88,46%	108,73%	108,73%	TLK

K-Wide	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional						
	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Min /
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0,12%	0,12%	TLK

Note : realisasi 2024 0,12 % dengan polarisasi Minimize (semakin rendah/mendekati 0,00% artinya capaian semakin baik)

K-Wide	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	Max /
Realisasi	100	100	100	99,88	98,48	98,48	TLK

K-Three	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	8b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	45%	60%	60%	75%	90%	90%	Max /
Realisasi	70,56%	85,22%	85,22%	91,11%	113,50%	113,50%	TLK

K-Three	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						
	9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	120	120	120	120	120	120	TLK

K-Wide	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						
	9b-N Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Min /
Realisasi	0,058%	0%	0%	0%	0%	0%	TLK

Note : realisasi 2024 sebesar 0% dengan polarisasi Minimize (semakin rendah/mendekati 0,00% artinya capaian semakin baik)

K-Three	Komunikasi publik yang efektif						
	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	Max /
Realisasi	105	100	100	100	100	100	TLK

K-Wide	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah						
	11a-N Indeks Efektivitas UKI						

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	5	15	15	20	82	82	Max/
Realisasi	5	15	15	20	98,79	98,79	TLK

K-Three	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah						
	11b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	35%	40%	40%	60%	98%	98%	Max /
Realisasi	50%	50%	50%	76%	100%	100%	TLK

Secara ringkas target dan realisasi capaian keluaran (output) KPKNL Banda Aceh pada tahun 2024 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja berikut:

Tabel 3. 1 Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2024

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120
Stakeholder Perspective (30%)								
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	113%	14,00%	42,42%	113,34	113,34
1b-CP	Indeks Integritas	P/L	89,17	92,44	19,00%	57,58%	103,67	103,67
Customer Perspective (20%)								
2	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/L	71,5%	72,49%	19,00%	50,00%	101,38	101,38

2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	P/L	86,5%	92,19%	19,00%	50,00%	106,58	106,58
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	60,23%	14,00%	50,00%	60,23	60,23
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	P/M	100%	123,48%	14,00%	50,00%	123,48	120,00
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	P/M	75	90	14,00%	100,00%	120,00	120,00
Internal Process Perspective (25%)								
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100%	102,48%	14,00%	50,00%	102,48	102,48
5b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100%	196%	14,00%	50,00%	196,00	120,00
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	65%	65,00%	14,00%	50,00%	100,00	100,00
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89%	108,73%	14,00%	50,00%	122,17	120,00
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	16%	0,12%	14,00%	100,00%	199,25	120,00
Learning and Growth Perspective (25%)								
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							

8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	85	98,48	14,00%	50,00%	115,86	115,86
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	90%	113,50%	14,00%	50,00%	126,11	120,00
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	120	14,00%	50,00%	120,00	120,00
9b-N	Persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN	P/M	10%	0,000%	14,00%	50,00%	200,00	120,00
10	Komunikasi publik yang efektif							
10a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80	100	14,00%	100,00%	125,00	120,00
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
11a-N	Indeks efektivitas UKI	P/M	82	98,79	14,00%	50,00%	120,48	120,00
11b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	P/M	98%	100%	14,00%	50,00%	102,04	102,04
NKO							110,69	

Sebagai perbandingan, agar dapat mengukur performa kinerja KPKNL Banda Aceh, kami sajikan capaian KPKNL Banda Aceh pada tahun 2023. Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilengkapi target pada tahun sebelumnya tentu tidak sama persis dengan IKU di tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh tantangan global dan evaluasi secara menyeluruh, sehingga dilakukan perbaikan-perbaikan melalui rencana strategis untuk mencapai kesempurnaan pencapaian visi dan misi DJKN khususnya KPKNL Banda Aceh. Adapun Target dan capaian kinerja KPKNL Banda Aceh pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. 2 Target dan Capaian Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	116,56%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%	122%
		1c-CP Indeks Integritas	88,67	89,17
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	98,43%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Penurunan Piutang Negara	100%	121,26%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	68,83%
		3b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	121,58%
		3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	103,33%
		3d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	120,51%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	0,13%
		4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70%	92,27%
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Presentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90%	100%
		5b-N Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN (minimize)	15%	0,00%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
6.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	6a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	86%	88,07%
7.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-CP Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90%	100%
		7b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120%
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	117,36%
		8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	120%
9.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	9a-N Indeks Pengawasan Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	70	96,4

Tabel 3. 3 Capaian KPKNL Banda Aceh dalam Renstra Kanwil DJKN Aceh 2020-2024

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi				
			2020	2021	2023	2023	2024
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial						
	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	55%	57%	60%	65%	70%
			-	70,61%	71,65%	68,83%	72,49%
		Implementasi evaluasi kinerja berupa tanah dan bangunan	100%	100%	100%	100%	100%
			121,50%	100,00%	111,98%	120%	196%
		Persentase bidang tanah yang disertipikatkan	100%	100%	100%	100%	100%
			100,00%	101,32%	105,66%	121%	102,48%
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara	100%	100%	100%	100%	100%
			108,72%	127,20%	194%	116%	113%
		Persentase efektivitas penyelesaian BKP	100%	100%	100%	100%	-
			163,46%	121,95%	100%	103%	-
2.	Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya						
	Pengelolaan lelang yang optimal	Persentase pencapaian hasil lelang (pokok lelang)	100%	100%	100%	100%	100%
				36,83%	120,35%	379,58%	98,43%
		Persentase produktivitas lelang	32%	34%	34%	80%	80%
				33,96%	48,84%	49,03%	122,00%

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien							
	Penilaian yang berkualitas	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	29%	28%	25%	25%
			0,27%	0,00%	0,04%	0,1%	0,12%
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien							
	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,00	4,00	4,00	-	-
			4,80	4,81	4,82	-	-
	Persentase kualitas anggaran	95%	95%	95%	100%	95%	
		98,93%	96,61%	97,54%	117%	120%	
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	70%	75%	75%	86%	80%	
		80,65%	85,86%	91,09%	88%	92,19%	

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Dari evaluasi kinerja terhadap IKU KPKNL Banda Aceh Tahun 2024 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DJKN Tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran Strategis I: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

Dalam Sasaran Strategis ini KPKNL Banda Aceh memperoleh 2 IKU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan dengan rincian:

a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Berasal Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang diperoleh dari PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara dan PNBPN Lelang. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang dicapai KPKNL Banda Aceh pada tahun 2024 dari Pengelolaan BMN adalah sebesar Rp20.067.578.976,00 dengan target pada tahun 2024 adalah sebesar Rp15.651.000.000,00 atau 128,22% dari target. Kemudian PNBPN Piutang Negara mencapai Rp32.509.030,59 atau 239,04%, pencapaian ini patut diapresiasi mengingat target sejumlah Rp13.600.000,00 Selanjutnya, PNBPN Lelang mencapai Rp2.943.408.257,00 atau 63,10% dari target Rp4.665.000.000,00. Meskipun PNBPN Lelang tidak mencapai target, ketiga pencapaian tersebut secara kolektif menghasilkan realisasi persentase realisasi penerimaan negara sebesar 113% dari target 100%.

b. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. IKU ini ditargetkan sebesar 89,17 dan terealisasi sebesar 92,44 atau tercapai hingga 103,67%.

Sasaran Strategis II: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Terhadap Sasaran Strategis ini KPKNL Banda Aceh mengusung 2 IKU yang terdiri dari:

a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. Terhadap target sebesar 71,5%, KPKNL Banda Aceh berhasil merealisasikan sebanyak 72,49% sehingga indeks nilai capaian sebesar 101,38%.

b. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

IKU Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN diukur dari Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2023 yang ditindaklanjuti oleh K/L ditambah Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2024 yang

ditindaklanjuti oleh K/L dibagi dengan penjumlahan dari Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2023 dan Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2024 dengan target 86,5%. Pencapaian target tahun 2024 adalah 92,19% atau indeks pencapaian sebesar 106,58%.

Sasaran Strategis III: Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

KPKNL Banda Aceh memperoleh 2 IKU terkait Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal dengan rincian:

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

KPKNL Banda Aceh menghitung IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang dari seberapa besar pendapatan pokok lelang yang berasal dari Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian. Adapun total target untuk tahun 2024 adalah Rp134.409.000.000,00 namun tercapai dengan nilai sebesar Rp80.957.716.619,00 yakni sebesar 60,23% dari nilai target.

b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Selain itu, terdapat pula IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara, yang bertujuan untuk menurunkan outstanding Piutang Negara secara terukur. Target awal tingkat Penurunan outstanding piutang negara untuk tahun 2024 adalah Rp1.900.000.000,00. Adapun pencapaian tahun 2024 adalah sebesar Rp2.346.190.654,29 dari Nilai Outsanding BKPN atau pencapaian realisasi target sebesar 123,48%. Pencapaian ini tidak lepas dari usaha keras KPKNL Banda Aceh terutama Seksi Piutang Negara. Adapun pencapaian penyelesaian ini didapat dari Pelunasan Piutang Negara, Penarikan Piutang Negara dan PSBDT.

Sasaran Strategis IV: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Pada Sasaran Strategis ini terdapat IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian. Pengukuran atas kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk terkait permohonan penilaian, sedangkan pengukuran atas penyelesaian penilaian yaitu terselesainya laporan penilaian dan penyampaian laporan dimaksud kepada pemohon. Adapun perhitungan rata-rata penyelesaian penilaian yaitu melalui perkalian antara indeks pelaksanaan penilaian per laporan penilaian dan jumlah laporan penilaian yang kemudian dibagi jumlah laporan penilaian. Target dari IKU ini sebesar 75 dengan capaian 90 sehingga indeks nilai capaian sebesar 120%.

Sasaran Strategis V: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan,

pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Banda Aceh mengusung 2 IKU yaitu:

a. Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan

Dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun 2024 bidang tanah objek target dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. K1: *Clean and Clear* (data yuridis dan fisik lengkap dan tidak sengketa/berperkara), dengan output berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP).
2. K2: *Not Clean but Clear* (data yuridis dan fisik tidak lengkap namun tidak sengketa/berperkara), dengan output berupa Sertipikat Hak Pakai/Peta Bidang Tanah (PBT).
3. K3: *Clean But Not Clear/Not Clean and Not Clear*, dengan output berupa Peta Tematik/Berita Acara Pemeriksaan Data Yuridis Dan/Atau Fisik BMN Berupa Tanah Dalam Rangka Pensertipikatan
4. K4: Update dan Validasi Data; untuk bidang tanah sudah bersertipikat namun belum dilakukan update di Master Aset SIMAN, dengan output berupa update data SIMAN dan validasi pada fitur Valserah.

KPKNL Banda Aceh berhasil menyelesaikan target kategori K1 sebanyak 257 bidang atau 82,37% dari target 312 bidang yang harus disertipikat. Selanjutnya, menyelesaikan target kategori K2 sebanyak 2 atau 100% dari target 2 NUP. Pada kategori K3 berhasil menyelesaikan sebanyak 1439 atau 99,58% dari target 1445 NUP dan pada kategori K4 berhasil menyelesaikan sebanyak 204 atau 210,31% dari target 97 NUP. Sehingga, memiliki total realisasi sebanyak 1.902 atau sebesar 102,48% dari target 1.856.

b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KM.6/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara, evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial, dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta pelaporan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara, observasi, survei, dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data dan analisis data menggunakan aplikasi portofolio aset. Hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya.

Evaluasi Kinerja Aset merupakan salah satu program unggulan DJKN yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan adanya penerapan portofolio aset tahunan, maka akan diperoleh 3 (tiga) manfaat yakni mengidentifikasi dan mengumumkan K/L yang menggunakan BMN secara kurang optimal; memaksimalkan penggunaan/pemanfaatan BMN berupa lahan/bidang tanah kosong dan/atau idle; dan mengidentifikasi tanah dan bangunan pemerintah yang memiliki potensi penggunaan/pemanfaatan alternatif yang lebih baik. Pada tahun 2024, KPKNL Banda Aceh berhasil menghitung evaluasi kinerja aset sejumlah 92 NUP serta terdapat 10 rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti Satuan Kerja, sehingga KPKNL Banda Aceh memiliki total realisasi sebanyak 102 NUP Evaluasi dan Tindak lanjut atau sebesar 196,16% dari target 51 NUP Evaluasi dan Tindak lanjut.

Sasaran Strategis VI: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

a. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Pengurusan Piutang Negara dikatakan optimal apabila tahapan pengurusan Piutang Negara telah dilaksanakan dan menghasilkan tertagihnya/ terselesaikannya Piutang Negara. Dalam hal ini, KPKNL Banda Aceh mendapat target IKU Persentase efektivitas penyelesaian BKPN Tahun 2024 sebesar 63 BKPN. KPKNL Banda Aceh dapat menyelesaikan seluruh target sebanyak 63 BKPN tersebut sehingga diperoleh pencapaian persentase 100%. Adapun program yang diusung DJKN yakni *Crash Program* sangat membantu Penanggung Hutang yang tidak mempunyai kemampuan usaha/finansial karena terkena dampak pandemi covid-19 untuk menyelesaikan utangnya.

b. Persentase Produktivitas Lelang

Dalam pengukuran IKU Persentase Produktivitas Lelang ini terdapat 2 komponen yang dilakukan pengukuran yaitu persentase Lelang laku keseluruhan (Jumlah frekuensi lelang laku secara proporsional jenis lelang dibagi jumlah frekuensi proporsional jenis lelang) dan frekuensi lelang tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian IKU Persentase produktivitas lelang tahun 2024 yaitu sebesar 108,73% atau 122,17% jika dihitung dengan indeks tanpa batas.

Sasaran Strategis VII: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian, ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Pada sasaran strategis ini, terdapat 1 (satu) IKU yaitu Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian, yang diformulasikan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang

dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Bagi para Penilai Pemerintah di KPKNL Banda Aceh, tentu ini merupakan hal yang wajar, karena nilai yang dihasilkan dari laporan yang telah dibuat merupakan gambaran nilai wajar terhadap objek penilaian. Pada tahun 2024, KPKNL Banda Aceh memperoleh target sebesar 16% dengan realisasi sampai akhir tahun 2024 tercapai 0,12 dengan asumsi 100% nilai yang dihasilkan oleh KPKNL dapat dipergunakan oleh satker. Hal ini menghasilkan indeks capaian IKU sebesar 199,25%. Oleh karena realisasi semakin mendekati 0%, maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang dihasilkan oleh para Penilai Pemerintah KPKNL Banda Aceh dapat menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Analisa-analisa dan kajian-kajian yang diasumsikan sesuai dengan kondisi pasar/pendapatan/biaya saat penilaian dilakukan merupakan faktor yang mendukung tercapainya IKU ini.

Sasaran Strategis VIII: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Dalam Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif, KPKNL Banda Aceh memperoleh 2 (dua) IKU sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan sistem penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Dalam rangka memastikan seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, maka diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, yaitu proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two. Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. KPKNL

Banda Aceh berhasil merealisasikan IKU sebesar 98,48% dari target 85% sehingga indeks nilai capaian sebesar 115,86%.

b. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Formula IKU ini diperoleh dari 2 (dua) komponen yaitu Pelaksanaan Kebintalan di KPKNL Banda Aceh serta Realisasi pemenuhan Jam Pelatihan (JP) pada seluruh Pejabat/Pegawai di KPKNL Banda Aceh. Pada tahun 2024 KPKNL Banda Aceh mencapai realisasi 113,50% dari target 90% atau 126,11%.

Sasaran Strategis IX: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, KPKNL Banda Aceh memperoleh 2 (dua) IKU dengan rincian:

a. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA, yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Melalui IKU ini dapat dilakukan pengukuran tingkat daya serap Belanja Barang dan Belanja Modal terhadap pagu Belanja Barang dan Belanja Modal serta optimalisasi penyerapan anggaran. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh pada tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target sebesar 100%.

b. Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bidad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP: 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN diukur dari:

1. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
2. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Target Deviasi PNBP dari Bidad PPN adalah 10%. Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%. Realisasi dari deviasi data PNBP Fungsional DJKN yaitu sebesar 0,00%, sehingga KPKNL Banda Aceh memperoleh nilai capaian 200% jika diukur dengan indeks tanpa batas.

Sasaran Strategis X: Komunikasi Publik Yang Efektif

Sejak tahun 2024 seluruh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan diberikan mandat agar dapat mengukur efektivitas komunikasi publik. Pada sasaran strategis ini, KPKNL Banda Aceh memperoleh 1 (satu) IKU yaitu Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) guna memberikan informasi publik yang andal dan berkualitas. Target Indeks PPID yaitu 80 dengan realisasi tahunan 100 atau tercapai hingga 125%.

Sasaran Strategis XI: Pengawan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Banda Aceh memperoleh 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dirincikan sebagai berikut:

a. Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU Efektivitas UKI merupakan IKU Cascading baru di tahun 2024, dimana sebelumnya di ampu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal sebagai IKU Mandatory. Perhitungan IKU ini diperoleh dari hasil Penilaian atas Kertas Kerja Indeks Efektivitas UKI oleh Kanwil DJKN Aceh c.q Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, KPKNL Banda Aceh memperoleh nilai realisasi 98,79 dari target 82 atau indeksasi 120%.

b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen), berupa Rekomendasi *Policy Recommendation*, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain *Policy Recommendation*. IKU ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan organisasi dalam penyelesaian rekomendasi dari Itjen. KPKNL Banda Aceh memiliki 19 (sembilan belas) saldo pada tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti seluruhnya. Dengan demikian, dari target 98% telah tercapai realisasi sebesar 100% atau mencapai 102,4% dalam indeksasi.

3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Target

Secara umum, pencapaian IKU KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 berstatus hijau, dengan hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,69% dari nilai maksimal 120%. Pencapaian yang sangat luar biasa ini merupakan pencapaian dari seluruh pegawai KPKNL Banda Aceh.

Keberhasilan penerimaan PNPB Piutang Negara yang mampu mencapai Rp32.509.030,59 dari target sebesar Rp13.600.000,00 tidak terlepas dari kemampuan membaca situasi, dengan posisi keadaan yang serba sulit namun dengan adanya program pemerintah *Crash Program* yakni optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara, KPKNL Banda Aceh bersama penyerah piutang dapat memanfaatkan program tersebut untuk penyelesaian pengurusan Piutang Negara.

Penilai juga mampu menuntaskan pekerjaannya dengan baik yang ditandai dengan realisasi IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian sebesar 0,12%. Dengan realisasi yang semakin mendekati 0%, maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang dikeluarkan oleh para Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah KPKNL Banda Aceh merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Pengelolaan Kekayaan Negara yang terus berkoordinasi dengan kantor pertanahan telah berhasil menoreh prestasi dalam melakukan program sertipikasi BMN seperti sertipikasi terbanyak di tahun 2019 dan penyelesaian sertipikasi tercepat di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2024 KPKNL Banda Aceh berhasil menyelesaikan pensertipikatan 1902 bidang tanah dengan target kategori yang berbeda-beda.

Sementara itu, realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang belum berstatus hijau. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam. Dalam implementasinya, badan usaha dan badan hukum yang berada di Aceh harus segera merubah transaksi keuangannya ke Lembaga Keuangan Syariah, sehingga pada tahun 2021 Bank Konvensional harus menutup kantor operasionalnya di Aceh dan berubah ke Bank Syariah. Tahun 2024 merupakan tahun yang cukup menantang dalam rangka penerapan aturan tersebut. Perubahan ini cukup mempengaruhi pelaksanaan lelang di KPKNL Banda Aceh, dikarenakan perubahan perbankan konvensional ke bank Syariah berpengaruh terhadap kuantitas potensi dan permohonan lelang.

Seluruh pencapaian dan tantangan tersebut patut diapresiasi dan disyukuri. Walaupun ditengah banyaknya halangan, namun sebagian besar target mampu dicapai dengan optimal. Semua ini dikarenakan upaya-upaya maksimal yang terus dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh, termasuk

diantaranya adalah melakukan penggalan potensi lelang untuk jenis lelang yang belum optimal (eksekusi barang rampasan, non eksekusi wajib BMN dan non eksekusi sukarela).

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud baik berupa Dana maupun Manusia serta Peralatan dan Mesin. Pada tahun 2024, jumlah Sumber Daya Manusia KPKNL Banda Aceh lebih sedikit dari kebutuhan sesuai dengan analisis beban kerja, kendati demikian Sumber Daya Manusia yang ada telah berhasil menyelesaikan target dengan maksimal.

Sumber Daya Manusia juga turut serta mengembangkan inovasi dan dapat memaksimalkan teknologi yang ada dalam rangka pelaksanaan dan pemenuhan tugas, sehingga Sumber Daya Dana mengalami penghematan yang cukup signifikan.

5. Analisis atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

Berbagai inovasi dirancang oleh pegawai KPKNL Banda Aceh dalam rangka mempercepat proses bisnis yang ada sehingga menunjang keberhasilan atas pencapaian kinerja. Terhadap inovasi-inovasi tersebut, telah dilaksanakan *one on one meeting* perihal pengembangan sistem informasi di lingkungan unit Kanwil DJKN dan KPKNL oleh Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi (TSI) yang selanjutnya dirangkum dan disampaikan melalui Nota Dinas nomor ND-26/KN.8/2025 tanggal 8 Januari 2025, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a. ANTUM (Aplikasi Pelayanan Tamu Umum)

Yaitu aplikasi sistem antrian elektronik yang memungkinkan pengunjung mendapatkan nomor antrian pelayanan secara online. Aplikasi ini memuat data informasi pengunjung berupa identitas dan tujuan kedatangan yang dapat digunakan oleh petugas APT untuk memanggil petugas KPKNL Banda Aceh yang berkaitan dengan tujuan kedatangan pengunjung. Berdasarkan hasil *one on one meeting* dengan Direktorat TSI, aplikasi ANTUM dapat terus dilanjutkan untuk mendukung proses bisnis KPKNL Banda Aceh selama aplikasi APT Online yang sedang dikembangkan oleh Kantor Pusat belum diimplementasikan.

b. MONIKEN (Monitoring Integrasi Kekayaan Negara)

Ide baru ini bermanfaat untuk memantau progres pengelolaan kekayaan negara dan juga sebagai pengelompokan data arsip secara online yang dapat menunjukkan data aktual sesuai informasi yang diinput. Dengan adanya monitoring pengelolaan kekayaan negara ini, kepala seksi dan pegawai pada seksi pengelolaan kekayaan negara dapat mengetahui identitas setiap berkas yang telah selesai dikerjakan, pengelompokan berkas jika suatu saat dibutuhkan kembali, dan beberapa data lainnya seperti update capaian kinerja dan pengadministrasian nomor laporan pertanggungjawaban yang tentunya berdampak pada efisiensi kinerja pada seksi pengelolaan

kekayaan negara. Namun berdasarkan hasil evaluasi oleh Direktorat TSI, aplikasi MONIKEN saat ini tidak dapat dilanjutkan atas pertimbangan keamanan informasi dan perlindungan data. Guna optimalisasi layanan, pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dapat menggunakan layanan resmi Kementerian Keuangan (*Ms.Office 365*).

c. Tapak Tuan (Tampilan Teraktual Status Laporan Penugasan dan Keuangan)

Merupakan inovasi bentuk pelayanan administrasi dan keuangan melalui simplifikasi proses pembayaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga seluruh informasi disajikan dalam bentuk digital. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan aktual terkait status administrasi dan proses pembayaran perjalanan dinas sehingga mampu mempercepat proses pembayaran serta penatausahaan yang optimal pada setiap pelaksanaan tugas. Sebagaimana hasil *one on one meeting*, aplikasi Tapak Tuan juga tidak dapat dilanjutkan atas pertimbangan keamanan informasi dan perlindungan data.

d. Lelang UMKM

Selain dari inovasi KPKNL Banda Aceh sebagaimana tersebut di atas, terdapat program Lelang UMKM yang beberapa kali dilaksanakan sepanjang tahun 2024, melibatkan pelaku UMKM dan juga beberapa komunitas UMKM yang ada di Banda Aceh dengan target pasar yakni seluruh masyarakat Indonesia. Publikasi dilakukan melalui aplikasi lelang dan sosial media KPKNL Banda Aceh. Kegiatan ini tentunya mendorong IKU realisasi pokok lelang dan PNBPN Lelang. Namun hal yang sangat istimewa dari kegiatan ini adalah dapat memperkenalkan kebudayaan dan karya seni rakyat Aceh melalui lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat, memperluas jejaring penjualan kreativitas rakyat Aceh yang telah memiliki ide-ide kreatif, inovatif serta solutif.

e. *Crash Program*

Program ini merupakan program keringanan utang untuk meringankan utang para debitur. Program ini menawarkan keringanan seluruh utang bunga, denda, dan ongkos (BDO), ditambah keringanan utang pokok yg persentasenya bervariasi sesuai kondisi.

6. Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi

KPKNL Banda Aceh telah menyusun beberapa rencana aksi untuk pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2024, yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dari awal tahun 2024 untuk mendorong optimalisasi target SBSK yang kesesuaiannya di bawah 75% (sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan SBSK tahun 2023). Selain itu, melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan satker dalam pencapaian target sertifikasi tahun 2023 sebanyak 4.377 bidang.
- b. Menggencarkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak perbankan di wilayah kerja KPKNL Banda Aceh. Selain itu, melakukan koordinasi dengan satker-satker dan pihak lainnya seperti

UMKM, pegadaian, BUMN, dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPKNL Banda Aceh terkait lelang-lelang yang berpotensi untuk digali. Jenis lelang yang akan dioptimalkan di tahun 2024 adalah eksekusi barang rampasan, non eksekusi wajib BMN/BMD, dan non eksekusi sukarela UMKM, BUMN, dan pegadaian.

Seluruhnya telah dilaksanakan pada tahun 2024.

7. Rencana Aksi

Rencana aksi tahun 2025 akan dilakukan untuk mendukung rencana aksi terdahulu dan menjawab kembali tantangan dan target yang baru di tahun ini. KPKNL Banda Aceh telah menyusun beberapa rencana aksi untuk pencapaian sasaran kinerja, yaitu:

- a. Sinergi dan koordinasi dengan satuan kerja pengguna barang dalam rangka identifikasi potensi pemanfaatan BMN, optimalisasi penggunaan BMN, serta memonitoring tindak lanjut pengelolaan BMN yang telah terbit.
- b. Sinergi dan koordinasi dengan satuan koordinator wilayah dan kantor pertanahan dalam menyusun rencana kerja bersama guna mendukung percepatan sertifikasi BMN berupa Tanah.
- c. Melakukan koordinasi rutin dengan *stakeholders* meliputi Perbankan, UMKM, dan Pemerintah Daerah terkait prosedur dan persyaratan lelang, dan melakukan penggalan potensi Lelang.
- d. Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait implementasi Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id) Versi 2 kepada *stakeholders* Lelang.
- e. Melaksanakan penagihan langsung kepada debitur dan meningkatkan tahap pengurusan terhadap debitur (Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan, SPPBS dan PSBDT).
- f. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai dan kelompok jabatan fungsional melalui berbagai cara diantaranya diklat dan *sharing session*.
- g. Monitoring dan evaluasi peningkatan *hard competency* pegawai.
- h. Selain itu, tentunya juga melanjutkan rencana aksi tahun sebelumnya yang telah dianalisis dengan baik dan disesuaikan terhadap setiap indikator kinerja utama dan yang ada pada KPKNL Banda Aceh.

B. Kinerja Lainnya

Pada tahun 2024, KPKNL Banda Aceh meraih prestasi sebagai satker mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Tipe A I Banda Aceh dan Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Aceh berkinerja sangat baik dengan nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang sempurna "100" pada triwulan III Tahun Anggaran 2024.

Gambar 3. 2 Piagam Penghargaan IKPA Triwulan III 2024



C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator dari persentase kualitas pelaksanaan anggaran. KPKNL Banda Aceh dengan sinergi yang solid berkomitmen untuk mencapai target realisasi anggaran sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Realisasi capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2024 pada KPKNL Banda Aceh adalah sebesar 120% dari target 100%. Optimalisasi penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara optimal ditengah perubahan target yang menjadi proses bisnis utama DJKN, dengan tujuan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Sasaran Strategis. Berbagai penyesuaian Pagu anggaran juga dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh untuk dapat mewujudkan anggaran yang menunjang kinerja organisasi.

Dana yang dianggarkan dalam DIPA KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-015.09.2.537827/2024 tanggal 24 November 2023 adalah sebesar Rp2.537.829.000,00 dengan perubahan rencana penarikan dana dan perubahan pagu anggaran antar rincian output, revisi kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp2.442.133.405,00 atau dengan persentase realisasi atas anggaran sebesar 96,84%.

Adapun realisasi anggaran sebesar 96,84% tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang

Dana yang dianggarkan untuk belanja barang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.353.829.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.261.556.605,00 atau sebesar 96,08%.

2. Belanja Pegawai

Pada tahun anggaran 2024 tidak terdapat belanja pegawai dikarenakan sentralisasi pengelolaan gaji pegawai sesuai dengan Perdirjen KN Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi

Pengelolaan Gaji Pegawai untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tanggal 28 Februari 2020 yang telah berlaku sejak tahun 2021.

3. Belanja Modal

Dana yang dianggarkan untuk belanja modal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp184.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp180.576.800,00 atau sebesar 98,14%.

Tabel 3. 4 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan I Tahun Anggaran 2024

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
A) Nilai IKPA (Bobot 100%)			100,00
1. Revisi DIPA	100	10	10,00
2. Deviasi Hal III DIPA	100	10	10,00
3. Penyerapan Anggaran	100	20	20,00
4. Belanja Kontraktual	0	0	
5. Penyelesaian Tagihan	0	0	
6. Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10,00
7. Dispensasi SPM	100	5	5,00
8. Capaian Output	100	25	25,00
B) Nilai SMART (Bobot 0%)			
Nilai Kinerja Anggaran s.d. Triwulan I			100,00
Target IKU IKA			95,00
Indeks Capaian Kinerja IKU IKA Triwulan I			105,26%

Tabel 3. 5 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
A) Nilai IKPA (Bobot 100%)			100,00
1. Revisi DIPA	100	10	10,00
2. Deviasi Hal III DIPA	100	10	10,00
3. Penyerapan Anggaran	100	20	20,00
4. Belanja Kontraktual	0	0	
5. Penyelesaian Tagihan	0	0	
6. Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10,00
7. Dispensasi SPM	100	5	5,00
8. Capaian Output	100	25	25,00
B) Nilai SMART (Bobot 0%)			
Nilai Kinerja Anggaran s.d. Triwulan III			100,00
Target IKU IKA			95,00
Indeks Capaian Kinerja IKU IKA Triwulan III			105,26%

Tabel 3. 6 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan III Tahun Anggaran 2024

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
A) Nilai IKPA (Bobot 100%)			100,00
1. Revisi DIPA	100	10	10,00
2. Deviasi Hal III DIPA	100	10	10,00
3. Penyerapan Anggaran	100	20	20,00
4. Belanja Kontraktual	0	0	
5. Penyelesaian Tagihan	0	0	
6. Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10,00
7. Dispensasi SPM	100	5	5,00
8. Capaian Output	100	25	25,00
B) Nilai SMART (Bobot 0%)			
Nilai Kinerja Anggaran s.d. Triwulan III			100,00
Target IKU IKA			95,00
Indeks Capaian Kinerja IKU IKA Triwulan III			105,26%

Tabel 3. 7 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan IV Tahun Anggaran 2024

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggara	Capaian s.d. Triwulan IV
A. Nilai IKPA	100
1 Revisi DIPA	100
2 Deviasi Halaman III DIPA	100
3 Belanja Kontraktual	0
4 Pengelolaan UP dan TUP	100
5 Penyerapan anggaran	100
6 Penyelesaian Tagihan	0
7 Capaian Output	100
8 Dispensasi SPM (Pengurang)	100
B. Nilai SMART	100
Nilai Capaian IKU IKA s.d. Triwulan IV	120

Tabel 3. 8 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2024

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	537827 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH	PAGU	0	2.353,829,000	184.000,000	0	0	0	0	0	0	2.537,829,000
		REALISASI	0,00%	2.261,556,605 (96,08%)	180.576,800 (98,14%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.442,133,405 (96,23%)
		SISA	0	92,272,395	3.423,200	0	0	0	0	0	0	0
GRAND TOTAL		PAGU	0	2.353,829,000	184.000,000	0	0	0	0	0	0	2.537,829,000
		REALISASI	(0,00%)	2.261,556,605 (96,08%)	180.576,800 (98,14%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	2.442,133,405 (96,23%)
		SISA	0	92,272,395	3.423,200	0	0	0	0	0	0	95,695,595

Tabel 3. 9 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Kegiatan KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2024

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4700 Legislasi dan Litigasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	15,184,000 13,730,259 (90.43%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	15,184,000 13,730,259 (90.43%)
		SISA	0	1,453,741	0	0	0	0	0	0	0	1,453,741
2	4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,472,501,000 1,452,619,008 (98.65%)	184,000,000 180,576,800 (98.14%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,656,501,000 1,633,195,808 (98.59%)
		SISA	0	19,881,992	3,423,200	0	0	0	0	0	0	23,305,192
3	4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	PAGU REALISASI	0 0.00%	20,000,000 18,302,000 (91.51%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	20,000,000 18,302,000 (91.51%)
		SISA	0	1,698,000	0	0	0	0	0	0	0	1,698,000
4	4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	PAGU REALISASI	0 0.00%	22,440,000 20,673,057 (92.13%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	22,440,000 20,673,057 (92.13%)
		SISA	0	1,766,943	0	0	0	0	0	0	0	1,766,943
5	4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	31,311,000 27,364,531 (87.40%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	31,311,000 27,364,531 (87.40%)
		SISA	0	3,946,469	0	0	0	0	0	0	0	3,946,469
6	4798 Pengelolaan Aset	PAGU REALISASI	0 0.00%	792,393,000 728,867,750 (91.98%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	792,393,000 728,867,750 (91.98%)
		SISA	0	63,525,250	0	0	0	0	0	0	0	63,525,250
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	2,353,829,000 2,261,556,605 (96.08%)	184,000,000 180,576,800 (98.14%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	2,537,829,000 2,442,133,405 (96.23%)
		SISA	0	92,272,395	3,423,200	0	0	0	0	0	0	95,695,595

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh telah melaksanakan kinerja selama periode Tahun Anggaran 2024 dengan sedikit penurunan jumlah NKO dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat beberapa tantangan, namun secara umum dapat dilalui dan diselesaikan dengan sangat baik. Seluruh pencapaian IKU pada tahun 2024 memenuhi target bahkan pada beberapa IKU melebihi target, kecuali pada IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang yang mencapai nilai 60,23% dari target maksimal 100%.

Target yang terdiri atas 11 Sasaran Strategis dengan total 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Banda Aceh Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik, sebagian besar melebihi target. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berasal dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun anggaran tercapai sebesar 110,69% dari nilai maksimal 120%. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang harus terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya perbaikan terus menerus menuju kesempurnaan.

FAKTOR PENDUKUNG

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dari satuan kerja yang semakin menyadari pentingnya pengelolaan Aset Negara;
2. Motivasi tinggi yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
3. Hubungan yang telah terjalin baik dengan para stakeholder;
4. Dukungan antar seksi yang memadai dalam pelaksanaan penilaian BMN;
5. Animo masyarakat untuk membeli barang melalui lelang semakin tinggi;
6. Citra lelang di masyarakat yang semakin baik dan didukung oleh diterapkannya *e-auction*;
7. Dukungan dari Penyerah Piutang yang tinggi dalam penyelesaian Pengurusan Piutang Negara;
8. Respon yang tinggi dari Penyerah Piutang dalam proses rekonsiliasi data piutang;
9. Perencanaan yang tepat dalam pengalokasian anggaran belanja;
10. Pemberian dukungan yang maksimal dan terpadu dari seluruh pegawai.

KENDALA

Walau demikian, terdapat kendala-kendala yang dihadapi KPKNL Banda Aceh dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Masih besarnya saldo aset eks BRR dan lokasi yang tersebar;

2. Masih rendahnya tingkat pemahaman satuan kerja terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, salah satunya disebabkan oleh banyaknya peraturan/ketentuan yang baru. Hal ini menyebabkan masih adanya perbedaan pemahaman dari stakeholder dalam menafsirkan peraturan terkait tugas dan fungsi KPKNL;
3. Keterbatasan dukungan anggaran dan SDM dalam pengelolaan BMN ditingkat satuan kerja;
4. Terdapat satuan kerja dan *stakeholders* yang belum mampu memberdayakan secara maksimal teknologi informasi. Pengembangan sistem informasi di DJKN untuk mendukung proses bisnis dan pelaksanaan tugas dan fungsi seperti SIMAN V2 dan Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id) V2 turut menjadi tantangan dikarenakan perlunya adaptasi oleh *stakeholders*.
5. Terhadap lelang eksekusi hak tanggungan masih dalam proses adaptasi dengan penerapan Qanun Aceh terkait Lembaga Keuangan Syari'ah yang memberikan dampak signifikan terhadap kuantitas permohonan lelang. Selain itu, belum terdapat variasi pembiayaan untuk pembelian lelang dan timbulnya beberapa perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang baik non TGR ataupun TGR yang mengakibatkan penurunan peminat terhadap objek lelang.
6. Dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) juga memiliki beberapa tantangan dan permasalahan seperti wilayah kerja KPKNL Banda Aceh yang sangat luas dan sulit untuk ditempuh dengan perjalanan darat, beberapa aplikasi masih kurang mendukung percepatan proses pengelolaan, dan lambatnya proses pengelolaan diakibatkan oleh kompetensi *user* pengguna yang lemah juga penyampaian dokumen oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan;
7. Tantangan dalam pengurusan piutang negara meliputi seringnya Debitur tidak mengakui utang, sulitnya penagihan dengan alasan keberadaan Debitur tidak dapat diketahui, dan barang jaminan yang tidak dikuasai oleh pengelola piutang (PUPN);
8. Wilayah kerja KPKNL Banda Aceh yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas.

B. Saran

Saran secara umum untuk kinerja KPKNL Banda Aceh adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi pejabat dan pegawai di KPKNL Banda Aceh agar *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Secara lebih spesifik, saran agar semakin dapat meningkatkan kinerja dan memenuhi target capaian KPKNL Banda Aceh adalah dengan menetapkan dan menerapkan strategi-strategi baru yang dapat diimplementasikan melalui kerja keras dan kerjasama secara terpadu dari seluruh pegawai KPKNL, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima dan professional kepada *stakeholders* dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;

2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN serta mengutilisasi BMN;
3. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Terus melanjutkan proses penyelesaian pengelolaan BMN eks BRR NAD-Nias;
6. Meningkatkan penggalian potensi lelang, lelang pegadaian dan lelang sukarela;
7. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi;
8. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholders* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan dan implementasi sistem informasi terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
11. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegiatan yang bersifat lintas unit;
12. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
13. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Banda Aceh secara berkala;
14. Memberikan motivasi kepada para pegawai sehingga tercipta suasana kerja harmonis dan bersemangat untuk melebihi capaian target;
15. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;
16. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, utilisasi kekayaan Negara, serta sertifikasi BMN.

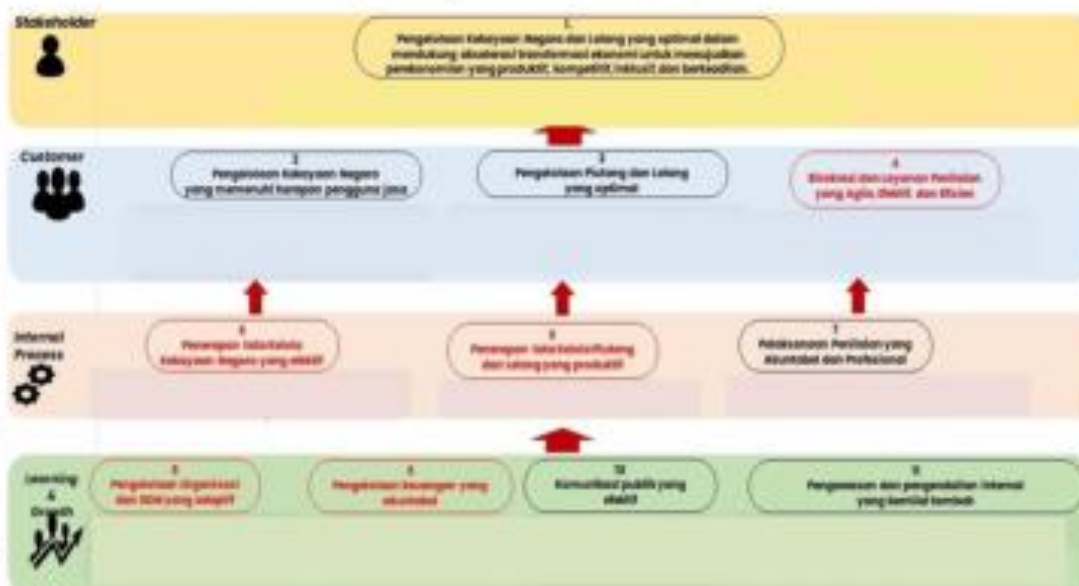
Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan menyeluruh kepada seluruh pihak terkait tugas dan fungsi KPKNL Banda Aceh. Selanjutnya, Laporan Kinerja agar dapat digunakan untuk merespon setiap perkembangan tuntutan *stakeholders* serta menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan di tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK -1 /WKN.01/2024
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Peta Strategi KPKNL Banda Aceh



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA
ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (20,3 M)
		1b-CP	Indeks integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (134,4 M)
		3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (1,9 M)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	65% (63 BKPN)
		6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-CP	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
		8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		9b-CP	Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%
10	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah	11a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		11b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Ijen yang ditindaklanjuti	98%

Program/Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp	823.704.000
Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	31.311.000
Pengelolaan Aset	Rp	792.393.000
Program Dukungan Manajemen	Rp	1.714.125.000
Legislasi dan Litigasi	Rp	15.184.000
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.656.501.000
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	20.000.000
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	22.440.000

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah
NIP 197411111994031001



Ditandatangani secara elektronik
Istina Setya Lestari
NIP 197512131995031001



**RINCIAN TARGET KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks Integritas						89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	50	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN		45	45			86,5	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	100	100	100	100	100	100	100
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							

5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan		40%	40%	60%	60%	100%	100%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
6	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	81%	81%	65%	65%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-CP	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	90%	90%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi data PNBFP Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
10	Komunikasi Publik yang Efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah							

11a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)						82	82
11b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Banda Aceh



Ditandatangani secara elektronik

Istina Setya Lestari

NIP 197512131995031001



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Istina Setya Lestari	1	NAMA	Nofiansyah
2	NIP	197512131995031001	2	NIP	197411111994031001
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina, IV/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
4	JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh	4	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh	5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A. UTAMA					
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dan Lelang	100 (Rp 20,3 M)	<i>Penerima Layanan</i>	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	Indeks Integritas	89,17	<i>Penerima Layanan</i>	

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5	<i>Penerima Layanan</i>
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5	<i>Penerima Layanan</i>
5	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100 (Rp 134,4 M)	<i>Penerima Layanan</i>
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100 (Rp. 1,9M)	<i>Penerima Layanan</i>
7	Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	<i>Penerima Layanan</i>
8	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100	<i>Proses Bisnis</i>
9	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	<i>Proses Bisnis</i>
10	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	65 (63 BKPN)	<i>Proses Bisnis</i>
11	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase Produktivitas Lelang	89	<i>Proses Bisnis</i>
12	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	<i>Proses Bisnis</i>
13	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
14	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
16	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
17	Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
18	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
19	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
B. TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 		<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>	
2	Akuntabel			

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>

PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Istina Setya Lestari
197512131995031001

Jakarta, 30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Nofiansyah
197411111994031001

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan		40%	40%	60%	60%	100%	100%
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
10	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	81%	81%	65%	65%
11	Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
12	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
13	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
14	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	90%	90%
15	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
17	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
18	Indeks efektivitas Kepatuhan Unit Internal (UKI)						82	82
19	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%

KONSEKUENSI	
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Aceh

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Banda Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah
NIP 197411111994031001



Ditandatangani secara elektronik
Istina Setya Lestari
NIP 197512131995031001

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 1A/WKN.01/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-1/WKN.01/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja		Target	Indikator Kinerja		Target
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi								
		Target							Target								
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Q1	Q2	Smt .1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1b-CP	Indeks Integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30%	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%

Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi								
		Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	86,5 %	86,5 %	86,5 %	2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10 %	45%	45%	60%	60%	86,5%	86,5 %
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100 %	100 %	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	20 %	40%	40%	60%	60%	100%	100 %
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100	8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82	11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	5	15	15	20	20	82	82

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah

Jakarta, 31 Mei 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Banda Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Istina Setya Lestari

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
15	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
15	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks kinerja anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1b-CP	Indeks Integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5 %	71,5 %	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30 %	50%	50%	60%	60%	71,5 %	71,5 %

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	86,5 %	86,5 %	86,5 %	2b-CP	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10 %	45%	45%	60%	60%	86,5 %	86,5 %
7	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100 %	100 %	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	20 %	40%	40%	60%	60%	100 %	100 %
15	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	15	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
19	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82	10a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	5	15	15	20	20	82	82

Jakarta, 31 Mei 2024

Pejabat yang dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Istina Setya Lestari

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah